

Pembangunan Wilayah Secara Berimbang

Aos Kuswandi

Abstract

The ideal region development is the balance inter regional development. Disparity of region development in Indonesia has been in pathetic condition both in the balance between rural and urban area and inter regional of the west, middle, and east of Indonesia area as well. One of the efforts that can be done is from the development planning process both in sectoral and development area. The prudence in planning is preventive action to produce the exact output policy.

Kata Kunci: Region development, development disparity, development balance

A. Pengantar

Pembangunan dalam skala nasional maupun lokal dewasa ini lebih menekankan pada pendekatan ekonomi makro. Akibatnya menimbulkan kecenderungan terjadinya kesenjangan pembangunan antarwilayah yang cukup besar. Kondisi yang terjadi bahwa investasi dan sumberdaya banyak terserap di wilayah perkotaan, sementara wilayah hiterland (feri-feri dan perdesaan) banyak terkuras sumberdaya secara berlebihan. Fenomena ini banyak terjadi dan mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Salah satu akibat adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah, maka semakin berkurangnya wilayah potensial baik darat, perairan maupun pantai karena kesalahan peruntukan dan pemanfaatan lahan. Hilangnya lahan-lahan budidaya seperti sawah, payau, kolam ikan, dan mangrove seluas

3,4 juta hektar atau setara dengan US\$ 11,307 juta ; gambaran ini bahkan menjadi lebih 'buram' apabila dikaitkan dengan keberadaan sentra-sentra produksi pangan yang hanya berkisar 4 % saja dari keseluruhan luas wilayah nasional,¹ . Belum lagi dengan semakin derasnya arus urbanisasi dari perdesaan ke kota maka hal ini semakin bertambahnya masalah kesenjangan. Kota semakin bertambah sumberdaya yang trampil sementara desa semakin terkuras sumberdayanya. Dampak ikutan lainnya bagi perkotaan adalah masalah lahan untuk perumahan, sehingga banyak bertumbuhnya kawasan kumuh padat penduduk yang justru menambah masalah bagi kota. Bertumpuknya sampah, drainase yang buruk, dan banjir mengancam dimana-mana. Frekuensi dan intensitas banjir diprediksikan terjadi 9 kali lebih besar pada dekade mendatang dimana 80% peningkatan banjir tersebut terjadi di Asia Selatan dan Tenggara (termasuk Indonesia) dengan luas genangan banjir mencapai 2 juta mil persegi.² Kesenjangan seperti ini akan berakibat fatal apabila tidak segera diatasi dengan berbagai upaya dalam penataan wilayah secara berimbang.

B. Pembangunan Wilayah Yang Ideal

Dalam perspektif kajian ilmu pemerintahan, pembangunan wilayah yang ideal adalah pembangunan wilayah yang seimbang antarwilayah baik perkotaan maupun dengan perdesaan juga antar wilayah Barat, Tengah dan Timur di Negara Indonesia. Konsep pembangunan daerah/wilayah ini diuraikan dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang bertujuan sebagai upaya mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan antarwilayah, termasuk juga didalamnya ketidakseimbangan kewenangan dan keuangan antara pusat dan daerah.

Namun sejatinya tujuan ideal dari otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut belum secara optimal

¹ Dengan kondisi pangan saat ini, Indonesia telah menjadi negara importir pangan dengan nilai sebesar Rp.16,62 trilyun (2000), sementara pada tahun 2035 diperkirakan tambahan ketersediaan pangan nasional lebih dari 2 x jumlah kebutuhan saat ini.. Dan apabila sentra-sentra pangan nasional tidak dapat dipertahakan keberadaannya , maka Indonesia akan menjadi *nett importir* pangan yang sangat besar pada masa mendatang.(Siswono, 2001)

² Britain's Meteorological Office (November 1999) dalam <http://www.ecobridge.org.htm>

berhasil. Kondisi sebaliknya terjadi bahwa dengan adanya kewenangan lebih luas kepada Daerah Kabupaten/Kota justru dalam hal pembangunan wilayah atau kawasan di daerah telah terjadi ketimpangan. Banyak peruntukkan lahan yang disalahgunakan, baik lahan darat perairan maupun laut. Kepemilikan perseorangan atau kelompok justru semakin menambah rusaknya lahan dan lingkungan di Daerah. Banyak hutan yang menjadi gundul akibat pembalakan hutan secara tidak bertanggungjawab, daerah tambang batubara dan pasir banyak yang tidak direklamasi, sungai tercemar akibat limbah industri dan galian pasir, dan hutan mangrove di pantai banyak yang abrasi karena banyak dibangunnya hotel/resot dan tempat wisata. Kondisi tersebut merupakan sebagian kecil saja akibat dari tidak seimbangya pelaksanaan pembangunan wilayah.

Timbulnya disparitas antarwilayah antara lain disebabkan oleh beberapa faktor. Rustiadi³ menjelaskan bahwa faktor utama penyebab disparitas antarwilayah yaitu: 1) geografi; 2) sejarah; 3) politik; 4) kebijakan pemerintah; 5) administrasi; 6) sosial budaya; dan 7) ekonomi. Dari aspek kebijakan pemerintah sebagai contoh, dewasa ini pembangunan lebih banyak menekankan pada pertumbuhan dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan yang tidak memperhatikan tata ruang wilayah dan peruntukkan lahan sehingga mengakibatkan kesenjangan wilayah yang cukup parah. Dampak yang paling nampak adalah terjadinya pengurasan sumberdaya secara berlebihan. Berdasarkan kondisi tersebut maka pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pembangunan ke depan harus memperhatikan berbagai aspek termasuk keseimbangan pembangunan wilayah.

Secara ideal Murty⁴ menjelaskan bahwa pembangunan regional (daerah/wilayah) yang berimbang merupakan sebuah pertumbuhan yang merata dari wilayah yang berbeda untuk meningkatkan

³ Ernan Rustiadi dkk, (2009) *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Crespent Press dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 238

⁴ S Murty, (2000), *Regional Disparities: Need and Measures for Balanced Development* dalam Shukla, A (Ed.) *Rgional Planning and Sustainable Development*. Kanishka Publishers, Distributors. New Delhi - 110 002, dalam Rustiadi Ernan, dkk (2009) , *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Crespent Press dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Hal. 226.

pengembangan kapabilitas dan kebutuhan mereka. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa tidak setiap wilayah harus mempunyai perkembangan tingkat industrialisasi, ekonomi, atau mempunyai kebutuhan pembangunan yang sama. Bentuk *uniformitas* dalam pembangunan antarwilayah tidak tepat di sini. Kewajiban pemerintah dan pemangku kepentingan dalam kerangka *good governance* adalah bagaimana bisa tercapainya pertumbuhan secara optimal dari potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah/wilayah sesuai kapasitas dan kewenangannya.

Keberimbangan antarkawasan menjadi penting karena keterkaitan yang bersifat simetris akan mampu mengurangi disparitas antarwilayah, dan pada akhirnya mampu memperkuat pembangunan ekonomi wilayah secara menyeluruh. Murty⁵ menjelaskan bahwa Pemerintah memerlukan pembangunan wilayah secara berimbang dengan tujuan yaitu: a) untuk mengembangkan perekonomian secara simultan dan bertahap; b) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat; c) untuk mengoptimalkan pengembangan kapasitas dan mengkonservasi sumberdaya; d) untuk meningkatkan lapangan kerja; e) untuk mengurangi beban sektor pertanian ; f) untuk mendorong desentralisasi; g) untuk menghindari konflik lepas kendali dan instabilitas politik disintegratif; h) untuk meningkatkan ketahanan nasional. Tujuan ideal dari pembangunan wilayah yang seimbang diharapkan dapat tercapai secara bertahap dan akhirnya tercapai pada kondisi ideal dari pembangunan wilayah tersebut. Dalam hal ini maka diperlukan komitmen dari pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersama-sama untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang seimbang.

Terkait dengan upaya mencapai keseimbangan pembangunan wilayah, sebagai contoh dalam hal pembangunan kawasan pesisir maka **strategi penayaganaan penataan ruang wilayah perlu** disusun dengan memperhatikan faktor-faktor berikut⁶:

⁵ Ibid hal 235-237

⁶ Dirjen penataan ruang dan wilayah, Dep. Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Makalah Seminar Nasional tentang Pengaruh Global Warming terhadap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditinjau dari Kenaikan Permukaan Air Laut dan Banjir yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) di Jakarta, 30 – 31 Oktober 2002

- a. **Keterpaduan** yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam konteks pengembangan kawasan pesisir sehingga tercipta konsistensi pengelolaan pembangunan sektor dan wilayah terhadap rencana tata ruang kawasan pesisir.
- b. Pendekatan *bottom-up* atau mengedepankan peran masyarakat (*participatory planning process*) dalam pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir yang transparan dan *accountable* agar lebih akomodatif terhadap berbagai masukan dan aspirasi seluruh *stakeholders* dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. **Kerjasama antar wilayah** (antar propinsi, kabupaten maupun kota-kota pantai, antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, serta antara kawasan hulu dan hilir) sehingga tercipta sinergi pembangunan kawasan pesisir dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah
- d. **Penegakan hukum** yang konsisten dan konsekuen - baik PP, Keppres, maupun Perda - untuk menghindari kepentingan sepihak dan untuk terlaksananya *role sharing* yang 'seimbang' antar unsur-unsur *stakeholders*.

C. Penutup

Disparitas pembangunan wilayah di Indonesia sudah berada pada kondisi yang memprihatinkan baik keberimbangan antara pembangunan perdesaan dan perkotaan maupun antar wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Untuk itu maka diperlukan berbagai upaya agar keseimbangan pembangunan antarwilayah dapat diwujudkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mulai dari proses perencanaan pembangunan baik dalam sektoral maupun wilayah pembangunan. Kehati-hatian dalam perencanaan merupakan tindakan preventive untuk menghasilkan output kebijakan yang tepat. Pada sisi yang lain pemerintah sebagai pengambil keputusan harus mampu terhindar dari adanya intervensi pihak-pihak tertentu yang akan mempengaruhi kebijakan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Wibawa pemerintah akan turut menentukan bagaimana tujuan ideal dari pembangunan antarwilayah ini dapat dicapai.

Daftar Pustaka

- Alfirdaus, Laila Kholid dan Longgina Novadona Bayo. 2007. "Penataan Daerah sebagai Penataan Institusi (*Territorial Reform as Institutional Building and Reform*). Makalah, disampaikan pada Seminar Internasional ke-8 "Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Penataan Daerah (*Territorial Reform*) dan Dinamikanya", yang diselenggarakan oleh Yayasan Percik, Salatiga - Jawa Tengah, pada tanggal 17 - 20 Juli.
- Djohan, Djohermansyah. 2006. "Mengkaji Kembali Konsep Pemekaran Daerah Otonom". Dalam *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan *Partnership for Governance Reform in Indonesia* dan *European Union (EU)*.
- Fitriani, Fitriana, Bert Hofman dan Kai Kaiser. 2005. "Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in a Decentralizing Indonesia", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 41 (1).
- Hermanislamet, Bondan. 1993. *Desentralisasi Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah* dalam Jurnal Forum Perencanaan Pembangunan Vol. 1 No. 2 Desember. Yogyakarta: Puslit Perencanaan Pembangunan Nasional UGM.
- S Murty, 2000. *Regional Disparities: Need and Measures for Balanced Development* dalam Shukla, A (Ed.) *Regional Planning and Sustainable Development*, New Delhi. Kanishka Publishers, Distributors.
- Pratikno. 2006. "Politik Kebijakan Pemekaran Daerah". Dalam *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa

bekerjasama dengan *Partnership for Governance Reform in Indonesia dan European Union (EU)*.

Romli, Lili, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rondinelli, Dennis A. Dan G Shabbir Chema (eds), 1983, *Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countris*, Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publications.

Rustiadi Ernan, dkk (2009) , *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Crespent Press dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.